

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

Bahu membahu dalam pengabdian,
tingkatkan kinerja.



PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS I A

Jl. Gatot Subroto No. 10 Sadia
Kecamatan Mpunda, Kota Bima
Kode Pos 84115

 www.pa-bima.go.id

 info@pa-bima.go.id

 @pa-bima



Sambutan Ketua Pengadilan Agama Bima

Bahu membahu dalam pengabdian, tingkatkan kinerja.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara-saudari yang terhormat,

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bima Tahun 2023 ini mencerminkan komitmen kami dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi publik, fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam upaya memberikan informasi yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan, kami merangkum capaian kinerja, keberhasilan, dan tantangan Pengadilan Agama Bima. Laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, dengan fokus pada pelaksanaan program kerja di bidang teknis yustisial dan administrasi kesekretariatan, sejalan dengan Visi-Misi Pengadilan Agama Bima.

Capaian pada 2023 tak terlepas dari kerjasama dan sinergi antara pimpinan, hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Bima. Ucapan terima kasih setinggi-tingginya kami sampaikan atas dedikasi dan kerja keras semua pihak yang bersama-sama berkontribusi. Analisis yang kami paparkan diharapkan menjadi landasan evaluasi, baik secara internal maupun eksternal, untuk membantu menentukan arah kebijakan dan program di tahun mendatang. Setiap saran konstruktif dari Anda sangat kami harapkan demi meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kami.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bima, 8 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Bima,



Drs. Muh. Mukrim, M.H.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
BAB II. A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BIMA	15
• Keadaan Perkara Tingkat Pertama	15
• Keadaan Perkara Tingkat Banding	19
• Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	20
• Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	21
B. PENYELESAIAN PERKARA	22
• Jumlah Sisa Perkara yang diputus	22
• Jumlah Perkara yang diputus Tepat Waktu	23
• Jumlah Sisa Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	23
• Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi	26
C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	27
• Posbakum	27
• Sidang Keliling	28
• Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	30
BAB III. SUMBER DAYA MANUSIA	31
KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN	31
A. Mutasi	36
B. Promosi	36
C. Pensiun	37
D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	37
BAB IV. PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	38
A. Pengelolaan Keuangan	38
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	39
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	43
BAB V. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	48
A. Akreditasi Penjamin Mutu	48
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	49
C. Inovasi Pelayanan Publik	50
BAB VI. PENGAWASAN	51
A. Internal	51
B. Evaluasi	52
BAB VII. PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Rekomendasi	54



BAB 1 – PENDAHULUAN

Laporan ini menggambarkan kegiatan Pengadilan Agama Bima sebagai lembaga pelayanan publik yang berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan. Dalam upaya merealisasikan komitmennya, Pengadilan Agama Bima menjunjung prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Cikal bakal berdirinya Pengadilan Agama Bima tidak lepas dari sejarah panjang Kesultanan Bima yang terbentuk sejak tahun 1620. Sebagai kerajaan Islam, Kesultanan Bima menerapkan hukum-hukum Islam dalam penyelesaian sengketa oleh sebab itu dibentuklah Mahkamah Syar'iyah pada 14 Agustus 1788. Mahkamah Syar'iyah ini kemudian berubah nama menjadi Badan Hukum Syara yang tertuang dalam *beslit* No. 42 Tanggal 4 Mei 1947.

Selanjutnya, pengakuan dan penggabungan diri Kesultanan Bima ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memaksa dilakukannya pemisahan antara lembaga peradilan dan non peradilan yang ada dalam tubuh organisasi Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 di daerah luar Jawa dan Madura dan berubah nama menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bima.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. B/IV/2/9/6550 tanggal 9 Desember 1964 H. Ishaq Abdul Qadir ditunjuk sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bima yang pertama.

Pada tahun 2022, berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 824/SEK/SK/VII/2022 Tanggal 04 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas, Pengadilan Agama Bima Kelas I B mendapatkan peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Bima Kelas I A.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan beragama Islam.

Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam, sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- 01 Perkawinan
- 02 Waris
- 03 Wasiat
- 04 Hibah
- 05 Wakaf
- 06 Zakat
- 07 Infaq
- 08 Shadaqah
- 09 Ekonomi Syariah

Visi



Terwujudnya Pengadilan Agama Bima Yang Profesional & Modern Dalam Rangka Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung



Misi



Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

Terwujudnya Aparatur Pengadilan Agama Bima Yang Profesional, Integritas Dan Bertakwa

Melaksanakan Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang Modern, Efektif Dan Efisien;

Melaksanakan Pengawasan Dan Pembinaan Yang Berkelanjutan.

Motto



TUNTAS

Terdepan, Unggul, Totalitas dan Akuntabilitas

Pengadilan Agama Bima memiliki tujuan utama yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun, yang didasarkan pada pernyataan visi dan misi. Tujuan tersebut mencakup:

- 01 Mengupayakan agar setiap individu yang mencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi melalui proses peradilan yang adil.
- 02 Menetapkan tujuan untuk menciptakan peradilan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga proses hukum dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.
- 03 Berfokus pada percepatan penyelesaian perkara hukum, memberikan keadilan dengan cepat dan efisien.
- 04 Meningkatkan kualitas putusan Pengadilan Agama Bima dengan memastikan bahwa keputusan tersebut didukung oleh pertimbangan hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang berlaku.

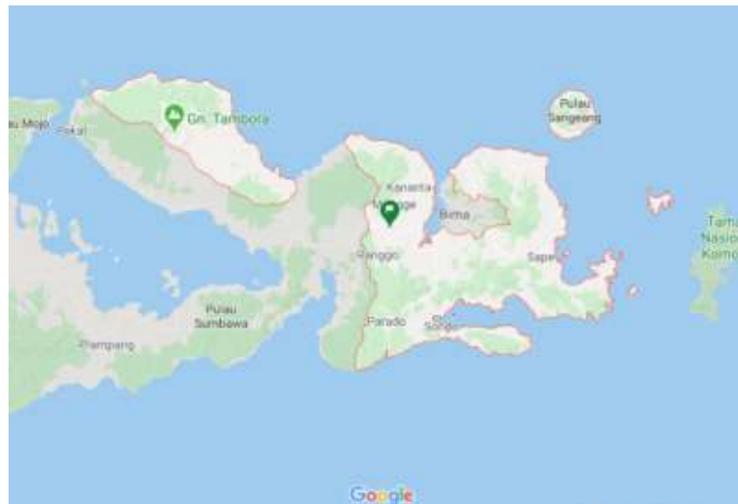
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Pengadilan Agama Bima menetapkan sasaran strategis yang melibatkan beberapa aspek kunci:

1. **Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel:** Mengupayakan agar proses peradilan menjadi lebih pasti, transparan, dan akuntabel bagi semua pihak yang terlibat.
2. **Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara:** Meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara, sehingga proses hukum dapat berjalan lebih efisien.
3. **Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan:** Menyediakan akses peradilan yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, memberikan kesempatan setara dalam mendapatkan keadilan.
4. **Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan:** Meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan, memastikan bahwa keputusan tersebut dihormati dan dijalankan dengan baik.
5. **Kualitas Pengawasan terhadap Kinerja Aparatur Peradilan:** Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kinerja aparat peradilan, memastikan profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas mereka.
6. **Dukungan Sarana dan Prasarana:** Meningkatkan dukungan di bidang sarana dan prasarana, agar Pengadilan Agama Bima dapat beroperasi dengan optimal.

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, Pengadilan Agama Bima merancang program dan kegiatan pokok, termasuk program dukungan manajemen, peningkatan manajemen peradilan agama, serta peningkatan sarana dan prasarana pengadilan. Semua upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keadilan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Bima kepada masyarakat.

Pengadilan Agama Bima, sebagai pilar utama keadilan di bawah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram, menempatkan dirinya sebagai garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Terletak di wilayah yang luasnya mencakup dua pusat pemerintahan, yakni Kota Bima dan Kabupaten Bima, serta melayani masyarakat yang berada pada 23 kecamatan dan 232 desa/kelurahan.

Luas keseluruhan wilayah hukum kami mencapai 4.611 km², menandakan tantangan dan tanggung jawab besar dalam menjamin pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.



Pengadilan Agama Bima memiliki yuridiksi yang sangat beragam, di sebelah **Utara** berbatasan dengan Laut Indonesia, di sebelah **Timur** berbatasan dengan Selat Sape, di sebelah **Selatan** berbatasan dengan Samudra Hindia, dan Kabupaten Dompu di sebelah **Barat**. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang unik, memerlukan adaptabilitas dan keahlian khusus dalam menangani berbagai kasus hukum yang bervariasi.

Tabel 1 : Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bima

Yuridiksi	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
Kota Bima	5 Kecamatan : Rasanse Barat, Mpunda, Asakota, Raba, dan Rasanse Timur	41 Kelurahan	222,25 Km ²	159.100 jiwa
Kabupaten Bima	18 Kecamatan : Monta, Parado, Bolo, Mada Pangga, Woha, Belo, Palibelo, Wawo, Langgudu, Lambitu, Sape, Lambu, Wera, Ambalawi, Donggo, Soromandi, Sanggar, dan Tambora.	191 Desa	4.389,40 Km ²	527.952 jiwa

Sumber : Kota Bima Dalam Angka Tahun 2023 – Kabupaten Bima dalam Angka Tahun 2023

KALEIDOSKOP TAHUN 2023

16
Januari



Penandatanganan Komitmen Bersama & Pakta Integritas.

Bertempat di Ruang Sidang Candra, Ketua Pengadilan Agama Bima membaca dan menandatangani Maklumat Pelayanan, Komitmen Bersama dan Pakta Integritas dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) diikuti oleh seluruh Aparatur Pengadilan Agama Bima.

06
Februari



Penandatanganan Perjanjian Kinerja Bagian Kesekretariatan

Sekretaris, Kasubbag dan Pelaksana Kesekretariatan Pengadilan Agama Bima melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Individu disaksikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. Acara penandatanganan diawali dengan laporan Sekretaris Pengadilan Agama Bima, Husninas, S.Ag. dalam laporannya beliau menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja (PK) ini merupakan target kerja individu yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Adanya PK akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja individu.

16
Februari



Kunjungan dan Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Dr. Drs H. Izzuddin HM, S.H., M.H. Ketua PTA Mataram dan rombongan melakukan kunjungan perdana pasca menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram. Kunjungan beliau dalam rangka monitoring sekaligus pembinaan bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Bima. Kedatangan beliau merupakan salah satu agenda rutin pimpinan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai serta pelayanan yang lebih optimal.

16
Februari



Pelantikan Wakil Ketua PA Bima dan Hakim PA Bima

Ketua Pengadilan Agama Bima, Drs. Nasrulloh, S.H. melantik H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima dan Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bima. Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima Kelas I A sebelumnya, Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. dimutasi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram Kelas I A.

13
Maret



Penandatanganan Kerja Sama Layanan Hukum Pengadilan Agama Bima Dengan PT. TIKI JNE Bima

Menindaklanjuti Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka dilakukan kerjasama dengan jasa pengiriman yang memiliki fasilitas tracking online dalam hal ini dipilih jasa kurir PT. TIKI JNE Bima.

28
April



Sidang Di Luar Gedung di Kecamatan Sape Kabupaten Bima

Hakim dan Tim Layanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Agama Bima melakukan sidang bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Sebanyak 12 Perkara disidangkan di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape.

26
Mei



Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima Sukses Melakukan Pemeriksaan Setempat dalam Kasus Sengketa Waris

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima, yang dipimpin oleh H. Ihyaddin, S.Ag., MH. melakukan pemeriksaan setempat (descente) dalam perkara sengketa waris di Desa Samili dan Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Pemeriksaan setempat ini dilakukan terhadap dua objek sengketa waris yakni satu petak tanah pekarangan dan satu petak tanah kebun.

29
Mei



Tim Hatiwasda PTA Mataram Lakukan Kunjungan Pembinaan dan Pengawasan ke Pengadilan Agama Bima

Tim Hatiwasda (Hakim Tinggi Pengawas Daerah) dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram melaksanakan kunjungan ke Pengadilan Agama Bima pada tanggal 29 hingga 30 Mei 2023. Tim ini diketuai oleh Drs. H. Triyono Santoso, S.H., Hakim Tinggi PTA Mataram, dan didampingi oleh Rusdiansyah, S.H., M.H., serta Abdul Halim, S.T., sebagai anggota tim. Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan pembinaan dan pengawasan rutin yang dilakukan oleh PTA Mataram.

26
Juni



Pengadilan Agama Bima Mendorong Kinerja dan Disiplin Pegawai dengan Sosialisasi E-Kinerja dan LHKASN

Pengadilan Agama Bima mengadakan acara sosialisasi yang bertujuan untuk memperkuat disiplin pegawai dan meningkatkan kinerja satuan kerja. Dalam acara yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, Ihyaddin, S.Ag., MH, seluruh pegawai dihimbau untuk secara rutin dan disiplin melaporkan capaian kinerja harian mereka melalui laporan Lembar Kinerja Harian (LKH). Menurut beliau, laporan ini merupakan indikator prestasi satuan kerja dan penting untuk mencapai sasaran kinerja pegawai tahunan.

05
Juli



Pengadilan Agama Bima dan PT. POS Indonesia Cabang Bima Bekerjasama dalam Modernisasi Pengiriman Dokumen Peradilan

penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama antara Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, H.Ihyaddin, S.Ag., M.H., dan Executive Manager PT. POS Indonesia Cabang Bima, Tri Rahayu Ningtiah. MOU ini membahas tentang "Layanan Pengiriman Dokumen Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak Pencari Keadilan Menggunakan Surat Tercatat" sebagai bagian dari modernisasi administrasi perkara di Indonesia.

27
Juli



Pengadilan Agama Bima Raih Penghargaan Peringkat I IKPA Tertinggi Kategori Satker Sedang

Bertempat di Aula Tambora Kantor Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis Tanggal 27 Juli 2023 Sekretaris Pengadilan Agama Bima Kelas I A selaku KPA menerima penghargaan sebagai Peringkat I IKPA Tertinggi Kategori Satker Sedang Tahun Anggaran 2022. Penghargaan ini diperoleh karena kerja keras Tim Pengelola Keuangan dan Program Perencanaan bersinergi dalam menata kelola anggaran

18
Agustus



Pekan Olahraga Bersama Meriahkan HUT Kemerdekaan RI dan HUT Mahkamah Agung Ke 78

Pengadilan Agama Bima dan Pengadilan Negeri Raba Bima melaksanakan kegiatan pekan olahraga bersama. Bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Raba Bima dilakukan senam bersama melibatkan seluruh aparatur Pengadilan Agama Bima, Pengadilan Negeri Raba Bima dan Anggota Dharmayukti Karini Cabang Raba Bima. Rangkaian olahraga dilanjutkan dengan pertandingan voli antara Tim Pengadilan Agama Bima dan Pengadilan Negeri Raba Bima di lapangan Kantor Telkom Bima

22
September



Inovasi Layanan Masyarakat Pengadilan Agama (LAMPA BIMA) Hadir Menyapa Masyarakat Pencari Keadilan Di Kecamatan Woha Kabupaten Bima

Bertempat di kantor KUA kecamatan Woha Kabupaten Bima, Tim Inovasi Layanan Masyarakat Pengadilan Agama (LAMPA) Bima beserta Tim Sidang luar gedung bersinergi melayani masyarakat pencari keadilan. Dilaksanakan Sidang luar gedung sekaligus pelayanan PTSP mobile Pengadilan Agama Bima di kantor KUA Woha.

29
September



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Lantik Ketua Baru Pengadilan Agama Bima

Dalam upacara resmi yang berlangsung di Aula Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, Dr. Izzudin, SH., MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, melantik Drs. Muh. Mukrim, MH sebagai Ketua Pengadilan Agama Bima Kelas I A. Drs. Muh. Mukrim, MH sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas I A. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.174/KMA/SK/IX/2023, di mana beliau diamanatkan menjadi Ketua Pengadilan Agama Bima, menggantikan Alm. Drs. Nasrulloh, SH.

24
November



Diskusi Hukum di Pengadilan Agama Sumbawa Membahas Perbaikan Pelaksanaan Perkara e-Court

Pengadilan Agama se Pulau Sumbawa menyelenggarakan Diskusi Hukum di Aula ruang sidang Pengadilan Agama Sumbawa. Acara ini dihadiri oleh rombongan Pengadilan Agama Bima yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, YM Drs. H. Muh. Mukrim, beserta Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, dan Panmud.

01
Desember



Asistensi Pembangunan Zona Integritas PA Bima oleh KPPN Bima

Pengadilan Agama Bima menggelar acara asistensi dan penandatanganan komitmen bersama untuk membangun Zona Integritas, menjelang awal tahun 2024. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kolaborasi dilakukan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima, yang memberikan dukungan dan kiat-kiat agar persiapan menuju WBK dapat berjalan sukses.



BAB II – KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA PENGADILAN AGAMA BIMA

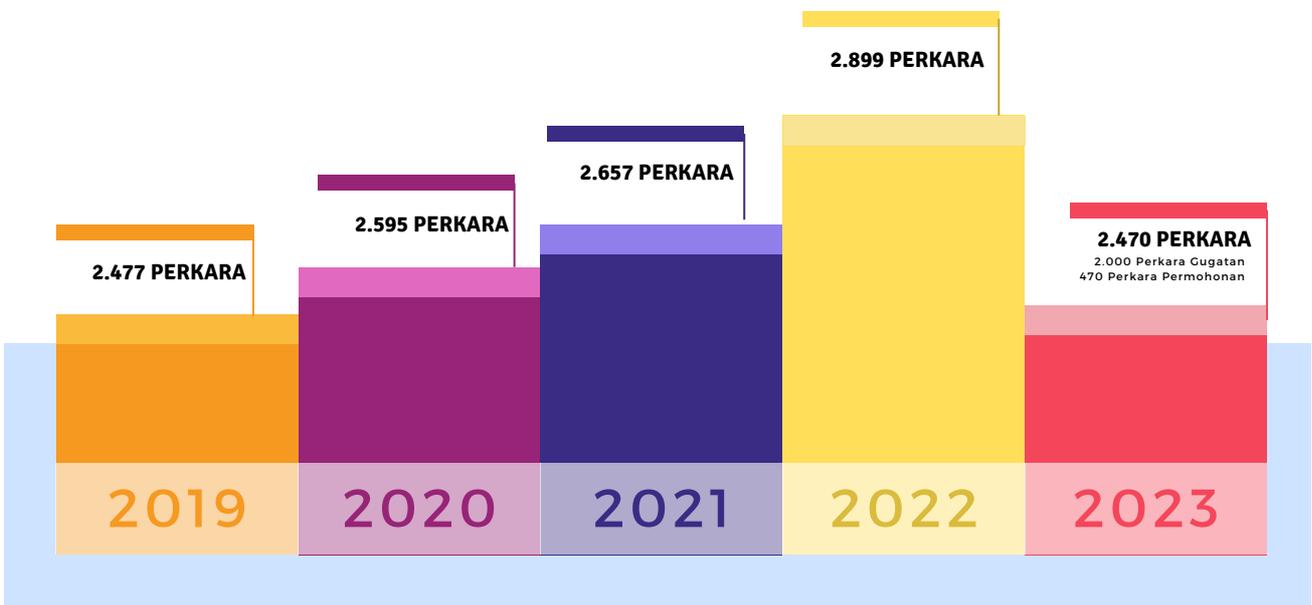
Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bima terus berkomitmen untuk menangani perkara dengan cermat, cepat, dan adil, dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam mengawali tahun 2023, terdapat 9 perkara dari tahun 2022 yang masih perlu diselesaikan. Dimana pada tahun 2022, Pengadilan Agama Bima telah menangani sebanyak 2.899 perkara. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 14,49 persen dibandingkan dengan tahun 2023.

Selama tahun 2023, Pengadilan Agama Bima menerima sebanyak 2.470 perkara, yang terdiri dari 2.000 perkara gugatan dan 470 perkara permohonan. Hal ini mencerminkan penurunan signifikan dalam jumlah perkara yang masuk dibandingkan tahun sebelumnya. Total perkara yang ditangani selama tahun 2023 mencapai 2.479 perkara.

Meskipun demikian, Pengadilan Agama Bima berhasil mempertahankan tingkat efisiensi yang tinggi. Sebanyak 2.433 perkara berhasil diputuskan selama tahun 2023 tersebut, menciptakan rasio penanganan perkara sebesar 98.1%.

Grafik 1: Penerimaan perkara



Berikut adalah gambaran secara terperinci mengenai keadaan perkara Pengadilan Agama Bima selama tahun 2023:

Perkara yang belum diselesaikan dari tahun sebelumnya (2022):

Jumlah perkara yang masih tersisa dari tahun 2022, sebanyak 9 perkara.

Jenis perkara yang diterima tahun 2023

Selama kurun waktu tahun 2023, Pengadilan Agama Bima menerima sebanyak 2.470 perkara, yang terdiri dari 2.000 perkara contentious (gugatan) dan perkara voluntair (permohonan) sebanyak 470 perkara.

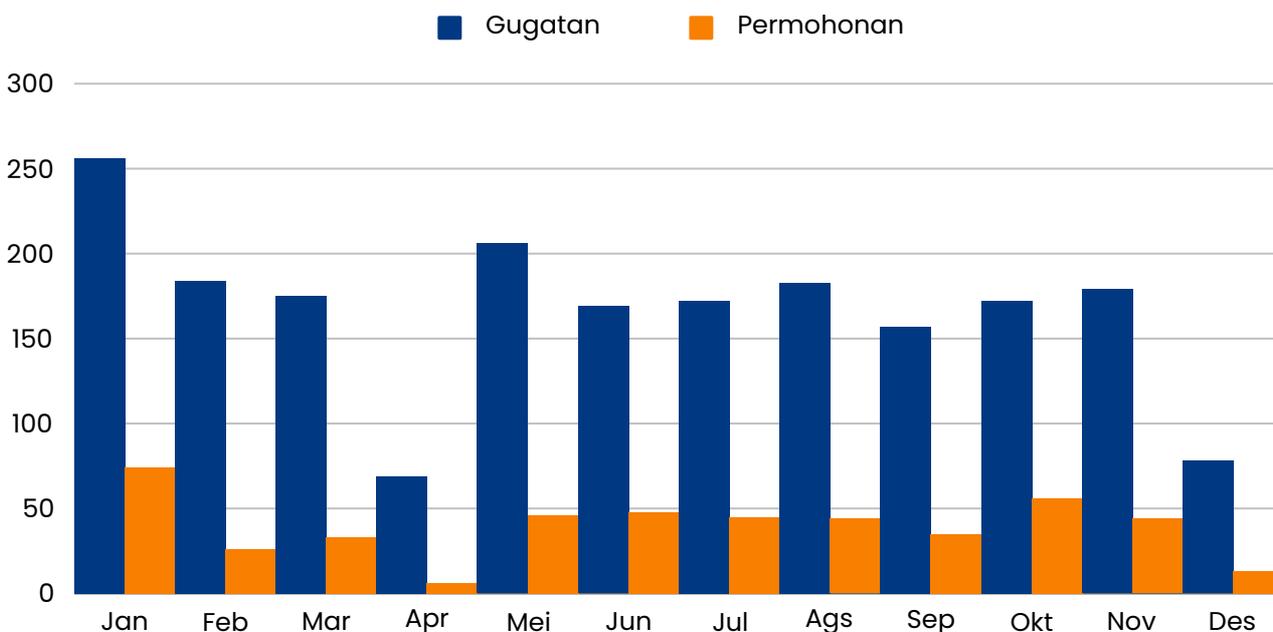
Tabel 2 : Jenis perkara yang diterima

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara 2022	Perkara Yg Diterima	Perkara Yg Diputus	Sisa Perkara 2023
1	Izin Poligami	-	2	2	
2	Pencegahan Perkawinan	-	1	1	
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	-	-	-	
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	-	-	-	
6	Cerai Talak	2	340	333	9
7	Cerai Gugat	1	1604	1581	24
8	Harta Bersama	4	17	16	5
9	Penguasaan Anak	-	0	0	
10	Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu	-	-	-	
11	Hak-hak Bekas Istri/Kewajiban Bekas Suami	-	-	-	
12	Pengesahan Anak	-	-	-	
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	-	
14	Perwalian	-	3	3	
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	2	2	
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan	-	-	-	
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	-	-	-	
18	Asal-usul Anak	-	5	5	
19	Penolakan Kawin Campuran	-	-	-	
20	Itsbat Nikah	-	118	117	1
21	Izin Kawin	-	-	-	
22	Dispensasi Kawin	-	309	309	
23	Wali Adhol	-	6	6	
24	Ekonomi Syariah	-	-	-	
25	Gugat Waris	2	21	17	6
26	Wasiat	-	-	-	
27	Hibah	-	0	0	
28	Wakaf	-	-	-	
29	Zakat/Infaq/Shadaqah	-	-	-	
30	Permohonan Penetapan Ahli Waris	-	20	20	
31	Denden Verzet	-	-	-	
32	Lain-lain	-	22	21	1
Jumlah		9	2470	2433	46

Pada awal tahun, Januari 2023, Pengadilan Agama Bima mencatat penerimaan tertinggi dengan total 330 perkara yang terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terdiri dari 256 perkara gugatan dan 74 perkara permohonan.

Namun, setelah periode tersebut, terjadi penurunan drastis pada bulan April, di mana penerimaan perkara mencapai titik terendah dengan hanya 69 perkara gugatan dan 6 perkara permohonan. Penurunan ini terjadi dikala memasuki Bulan Ramadhan.

Tabel 3 : Penerimaan perkara per bulan



Jenis perkara khusus yang diterima tahun 2023

Sejalan dengan upaya kami untuk memberikan pelayanan peradilan yang komprehensif dan merespons kebutuhan masyarakat, Pengadilan Agama Bima mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, belum menerima satu pun perkara khusus, yakni perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah.

Jenis perkara yang diputus tahun 2023

Selama tahun 2023, Pengadilan Agama Bima telah mengukir pencapaian luar biasa dengan berhasil memutus dan/atau menetapkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap 2.433 perkara. Pencapaian ini mencerminkan komitmen kami dalam memberikan keadilan kepada masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.964 perkara adalah hasil putusan pengadilan terhadap perkara *contentious* (gugatan). Tak hanya itu, sebanyak 469 penetapan juga telah diterbitkan untuk perkara *voluntair* (permohonan).

Dengan rasio penyelesaian perkara sebesar 98.1% menggambarkan tingkat efisiensi yang tinggi dalam menanggapi setiap perkara yang masuk ke meja peradilan. Keterlibatan dan keahlian hakim-hakim Pengadilan Agama Bima menjadi pilar utama dalam mencapai pencapaian ini.

Tabel 4 : Putusan perkara berdasarkan jenis perkara

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara 2022	Perkara Yg Diterima	Perkara Yg Diputus	Sisa Perkara 2023
1	Izin Poligami	-	2	2	
2	Pencegahan Perkawinan	-	1	1	
3	Cerai Talak	2	340	333	9
4	Cerai Gugat	1	1604	1581	24
5	Harta Bersama	4	17	16	5
6	Penguasaan Anak	-	2	2	
7	Perwalian	-	3	3	
8	Asal-usul Anak	-	5	5	
9	Itsbat Nikah	-	118	117	1
10	Dispensasi Kawin	-	309	309	
11	Wali Adhol	-	6	6	
12	Gugat Waris	2	21	17	6
13	Hibah	-	0	0	
14	Permohonan Penetapan Ahli Waris	-	20	20	
15	Lain-lain	-	22	21	1
Jumlah		9	2470	2433	46

Gambar 1 : Rekapitulasi perkara



Keadaan perkara Tingkat Banding

Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Agama Bima mencatat bahwa terdapat 2 perkara yang tersisa dalam proses banding. Selanjutnya, sepanjang tahun 2023, terdapat peningkatan signifikan di mana Pengadilan Agama Bima menerima 8 pengajuan perkara banding. Hal ini menunjukkan adanya ketertarikan dan kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa untuk mempertanyakan atau mendapatkan keputusan yang lebih rinci atau memuaskan dari tingkat peradilan yang lebih tinggi.

Gambar 2 : Penerimaan perkara banding



Tabel 5 : Sisa perkara banding tahun 2022

No. Perkara	Jenis Perkara	Ketua Majelis
1171/Pdt/2022/PA.BM	lain-lain	Drs. Nasrulloh, SH
1835/Pdt.G/2022/PA.Bm	Cerai Talak	Drs. Nasrulloh, SH

Tabel 6 : Penerimaan perkara banding tahun 2023

No.	No. Perkara	Jenis Perkara	Ketua Majelis	Keterangan
1.	1248/Pdt.G/2023/PA.Bm	CT	SOLATIAH	Putus
2.	1233/Pdt.G/2023/PA.Bm	BH	KHAFIDATUL AMANAH	Putus
3.	464/Pdt.G/2023/PA.Bm	CG	KHAFIDATUL AMANAH	Putus
4.	773/Pdt.G/2023/PA.Bm	CT	KHAFIDATUL AMANAH	Cabut
5.	152/Pdt.G/2023/PA.Bm	CT	USWATUN HASANAH	Putus
6.	609/Pdt.G/2023/PA.Bm	CG	USWATUN HASANAH	Cabut
7.	2061/Pdt.G/2022/PA.Bm	HB	DRS. NASRULLOH, S.H.	Cabut
8.	1729/Pdt.G/2023/PA.Bm	CG	IHYADDIN	Pengajuan

Keadaan perkara Tingkat Kasasi

Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Agama Bima mencatat bahwa terdapat 1 perkara yang diajukan sebagai permohonan kasasi. Sementara itu, sepanjang tahun 2023, Pengadilan Agama Bima menerima 2 perkara banding yang telah diajukan sebagai permohonan kasasi.

Gambar 3 : Penerimaan perkara kasasi



Rincian perkara tersebut sebagai berikut:

Tabel 7 : Sisa perkara kasasi tahun 2022

No. Perkara	Jenis Perkara	Ketua Majelis
673/Pdt.G/2022/PA.Bm	Kewarisan	Ridwan Fauzi, S.Ag., MH

Tabel 8 : Penerimaan perkara kasasi tahun 2023

No.	No. Perkara	Jenis Perkara	Ketua Majelis	Keterangan
1.	1835/Pdt.G/2022/PA.Bm	CT	NASRULLOH	Putus
2.	1171/Pdt.G/2022/PA.Bm	LAIN-LAIN	NASRULLOH	Cabut

Keadaan perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali merupakan proses hukum yang memberikan pihak yang bersengketa kesempatan untuk mengajukan keberatan atau melibatkan kembali perkara yang sudah mendapatkan putusan hukum tetap. Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bima mencatat bahwa tidak terdapat pengajuan perkara peninjauan kembali (PK) selama periode tersebut.

Gambar 4 : Penerimaan perkara peninjauan kembali

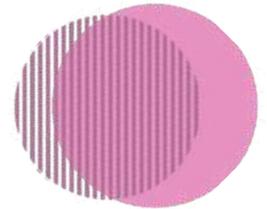


PUTUSAN



B. PENYELESAIAN PERKARA

**Rasio Penanganan Perkara Pengadilan Agama Bima
Pada Tahun 2023 sebesar 98.14%**



Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Dengan penuh dedikasi, Pengadilan Agama Bima berhasil menangani sebanyak 2.479 perkara, yang terdiri dari 2.470 perkara yang diterima selama tahun 2023 dan 9 perkara sisa dari tahun 2022.

Dari total perkara yang ditangani, sebanyak 2.433 perkara berhasil diputus oleh majelis hakim selama tahun 2023. Proses penyelesaian perkara ini menciptakan rasio penanganan perkara sebesar 98.14%, mencerminkan tingkat efisiensi yang tinggi dalam memberikan keadilan kepada masyarakat. Adapun sisa perkara yang belum diputus pada akhir tahun 2023 sebanyak 46 perkara, yang akan menjadi fokus kami untuk diselesaikan dengan cermat pada periode berikutnya. Kami memahami bahwa setiap perkara memiliki nilai dan urgensi yang berbeda, dan komitmen kami adalah memberikan penanganan terbaik.

Gambar 5: Sisa perkara



Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Bima telah mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014. Menurut surat edaran tersebut, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 bulan sejak didaftarkan dalam register perkara.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bima berhasil menangani sebanyak 2.433 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.425 perkara berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan sejak pendaftaran hingga diputus oleh Majelis Hakim dan Hakim Tunggal. Sedangkan, 8 perkara diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan.

Realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 mencapai 99,67%. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Bima dalam mematuhi batas waktu penyelesaian perkara sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Gambar 6 : Perkara diputus tepat waktu



Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bima berhasil mencapai capaian kinerja yang memuaskan. Dari total 2.433 perkara yang ditangani, sebanyak 2.425 perkara tidak mengajukan banding, mencerminkan tingkat kepuasan atau kepercayaan pihak-pihak yang bersengketa terhadap putusan yang dihasilkan oleh pengadilan tingkat pertama.

Dengan jumlah perkara yang tidak mengajukan banding tersebut, persentase perkara yang berhasil diputus mencapai 98.1% dari total perkara yang ditangani. Hal ini mencerminkan tingkat efisiensi dan keberhasilan Pengadilan Agama Bima dalam menangani, memutuskan, dan menyelesaikan perkara dengan baik.

Lebih lanjut, capaian kinerja Pengadilan Agama Bima pada tahun 2023 dapat diukur melalui perhitungan persentase capaian. Dengan capaian sebesar 110,75%, Pengadilan Agama Bima berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan dedikasi dan kemampuan pengadilan dalam memberikan pelayanan peradilan yang optimal.

Tabel 9 : Capaian target perkara yang tidak mengajukan banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan banding	Perkara yang tidak mengajukan banding	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2019	2.580	13	2.467	90	96,00	101
2020	2.653	14	2.639	90	99,9	110
2021	2.812	18	2.794	90	99,3	110,3
2022	2.913	8	2.905	90	99,7	110,8
2023	2.433	8	2425	90	99,67	110,75

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bima meraih pencapaian kinerja yang sangat memuaskan. Dari total 2.433 perkara yang ditangani dan diputus, sebanyak 2.431 perkara tidak mengajukan kasasi, mencerminkan tingkat kepuasan dan kepercayaan pihak-pihak yang bersengketa terhadap keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan tingkat pertama.

Dengan jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi sebanyak itu, persentase perkara yang berhasil diputus mencapai 99.92% dari total perkara yang ditangani.

Selain itu, capaian kinerja Pengadilan Agama Bima pada tahun 2023 mencapai 111.02%, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dapat diatributkan kepada meningkatnya rasa keadilan yang dirasakan oleh pencari keadilan, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Tabel 10 : Capaian target perkara yang tidak mengajukan kasasi

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan Kasasi	Perkara yang tidak mengajukan Kasasi	Target %	Realisasi %	Capaian %
2019	2.580	6	2.574	90	99,7	111
2020	2.653	1	2.652	90	99,9	110
2021	2.812	8	2.804	90	99,7	110,7
2022	2.913	2	2.911	90	99,9	111
2023	2.433	2	2.431	90	99.92	111,02

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bima mencapai pencapaian kinerja yang sangat positif dalam hal pengajuan perkara peninjauan kembali. Dari total 2.433 perkara yang diputus, tidak ada satu pun perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Hal ini mencerminkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan tingkat pertama.

Tabel 11 : Capaian target perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan PK	Perkara yang tidak mengajukan PK	Target %	Realisasi %	Capaian %
2019	2.580	-	2.580	100	100	100
2020	2.653	1	2.652	100	99,9	99,9
2021	2.812	-	2.812	90	100	111
2022	2.913	-	2.913	95	100	111
2023	2.433	-	2.433	95	100	111

Dengan tidak adanya perkara yang mengajukan peninjauan kembali, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ini mencapai 100%. Capaian ini sekaligus mencerminkan tingkat efisiensi dan keberhasilan Pengadilan Agama Bima dalam menyampaikan putusan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Capaian kinerja secara keseluruhan pada tahun 2023 mencapai 111%, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya rasa keadilan yang dirasakan oleh pencari keadilan, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap sistem peradilan.



Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui mediasi

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bima berhasil menangani sebanyak 2.470 perkara, yang terdiri dari 2.000 perkara contentious (gugatan) dan 470 perkara voluntair (permohonan). Dalam upaya meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara, kami melibatkan proses mediasi untuk sebagian perkara yang memenuhi syarat.

Dari jumlah total perkara yang ditangani, sebanyak 454 perkara atau 18.3% persen dari total perkara mendapatkan layanan mediasi. Mediasi menjadi alternatif yang efektif untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak tanpa harus melibatkan persidangan yang panjang.

Dari 454 perkara yang dilibatkan dalam mediasi, sebanyak 72 perkara atau 15.9% berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Perdamaian, mencakup hasil mediasi seperti penyelesaian sebagian, hingga pencabutan perkara. Meskipun demikian, sebanyak 382 perkara atau 84.1% dari perkara yang layak dimediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam proses mediasi (gagal).

**PERKARA TIDAK DAPAT DIMEDIASI**

454 perkara

**MEDIASI GAGAL**

382 Perkara

**MEDIASI BERHASIL**

72 Perkara

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bima dengan bangga mempertahankan posisinya di peringkat tiga besar Pengadilan Agama dengan tingkat keberhasilan mediasi tertinggi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Prestasi ini mencerminkan komitmen dan dedikasi kami dalam memberikan alternatif penyelesaian perkara yang efektif dan memberikan keadilan kepada masyarakat.

Peringkat 3 ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim Pengadilan Agama Bima yang terlibat dalam pelaksanaan mediasi. Keberhasilan ini tidak hanya menciptakan kebanggaan bagi lembaga peradilan, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pengadilan kami telah berhasil menyediakan sarana penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif.

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pengadilan Agama Bima melaksanakan program Posbakum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam **Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010**. Dengan adanya Posbakum, diharapkan masyarakat yang membutuhkan akses keadilan dapat memperoleh bantuan hukum yang layak dan bermutu.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bima telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 96.000.000,00 untuk kegiatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan tujuan memberikan layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses realisasi anggaran dilakukan melalui pengadaan langsung penyedia jasa, dan Lembaga Bantuan Hukum Imparsial terpilih sebagai penyedia jasa untuk melaksanakan program tersebut.

Layanan Posbakum yang disediakan mencakup:

1. **Konsultasi hukum.**
2. **Pembuatan gugatan/permohonan.**

Proses pemberian bantuan hukum melibatkan penerima jasa Posbakum yang memiliki hak menerima bantuan hukum gratis. Penerima jasa Posbakum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat, terutama perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya.

Posbakum
LBH 'Imparsial'



960 jam layanan

melayani 1.353 masyarakat pencari keadilan



Kegiatan Posbakum



Kegiatan Posbakum

Sidang Di luar Gedung (Sidang Keliling)

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bima terus berkomitmen untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau jauh dari kantor pengadilan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan sidang di luar gedung (sidang keliling) di berbagai lokasi strategis seperti Balai Kantor Kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum lain yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dalam tahun 2023, Pengadilan Agama Bima berhasil melaksanakan sidang keliling sebanyak 15 kali di berbagai Kecamatan di Kabupaten Bima. Pelaksanaan ini memanfaatkan dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Seluruh dana yang dialokasikan tersebut berhasil direalisasikan sepenuhnya, mencapai angka 100% dari Pagu Anggaran yang telah ditetapkan.

Sidang keliling ini tidak hanya menjadi wujud nyata dari pelayanan peradilan yang inklusif, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau dapat dengan mudah mengakses proses peradilan.

Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung ini juga tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah kabupaten Bima dan juga jajaran aparatur KUA dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima. Kerjasama ini tentunya untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat terjangkau hingga ke pelosok daerah.

Tabel 12 : Pelaksanaan sidang diluar gedung

Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan Sidang	Anggaran
KUA Langgudu	16 Februari 2023	Rp 5.000.000
KUA Woha	10 Februari 2023	Rp 5.000.000
KUA Lambu	10 Maret 2023	Rp 5.000.000
KUA Belo	17 Maret 2023	Rp 5.000.000
KUA Sape	17 April 2023	Rp 5.000.000
KUA Sape	28 April 2023	Rp 5.000.000
KUA Woha	19 Mei 2023	Rp 5.000.000
KUA Woha	26 Mei 2023	Rp 5.000.000
KUA Bolo	16 Juni 2023	Rp 5.000.000
KUA Bolo	23 Juni 2023	Rp 5.000.000
KUA Lambu	24 Juli 2023	Rp 5.000.000
KUA Lambu	31 Juli 2023	Rp 5.000.000
KUA Woha	18 Agustus 2023	Rp 5.000.000
KUA Woha	25 Agustus 2023	Rp 5.000.000
KUA Woha	22 September 2023	Rp 5.000.000



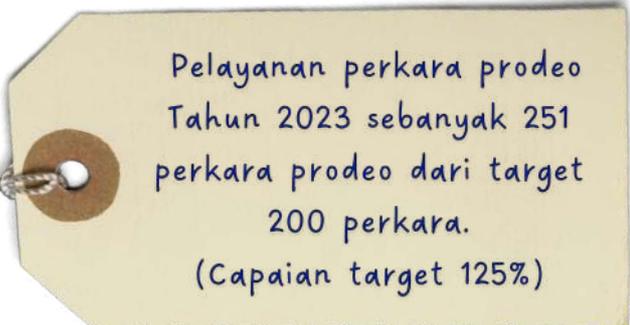
Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bima secara aktif mewujudkan komitmen dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu dengan melaksanakan program Perkara Prodeo. Program ini memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengajukan perkara perdata tanpa biaya perkara, memastikan bahwa hak untuk mencari keadilan tetap terjaga.

Dalam kerangka pelaksanaan program, Pengadilan Agama Bima telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp70.000.000 untuk mendukung kegiatan Perkara Prodeo. Realisasi anggaran pada tahun tersebut mencapai Rp63.350.000, mencapai tingkat realisasi sebesar 90,5% dari total alokasi anggaran yang telah disediakan. Sejumlah 251 telah diselesaikan dengan anggaran perkara prodeo.

Realisasi dana ini mencakup pembiayaan berbagai aspek pelaksanaan perkara Prodeo, termasuk biaya administrasi, transportasi, dan faktor pendukung lainnya. Keberhasilan dalam mencapai tingkat realisasi yang signifikan menunjukkan efisiensi dan ketelitian dalam pengelolaan dana yang diberikan.



Pelayanan perkara prodeo
Tahun 2023 sebanyak 251
perkara prodeo dari target
200 perkara.
(Capaian target 125%)



BAB II – SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

SDM Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Bima terdiri dari berbagai elemen yang mendukung fungsi dan kinerja pengadilan. Elemen-elemen tersebut melibatkan tenaga yang memiliki keahlian teknis di bidang yudisial. Berikut adalah komponen sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Agama Bima:

Tabel 13 : Komposisi SDM Teknis Yudisial

Nama	Jabatan	Keterangan
Drs. Muh. Mukrim, M.H.	Ketua	Menjabat sejak Sep 2023
H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	Menjabat sejak Feb 2023
Drs. H. Ikhlas	Panitera	
Abubakar, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	
Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.	Hakim Tingkat Pertama	
Uswatun Hasanah, S.HI.	Hakim Tingkat Pertama	
Solatieh, S.H.I.	Hakim Tingkat Pertama	
Arifuddin Yanto, S.Ag.	Panitera Muda Hukum	
Sri Atika, S.E., S.H.	Panitera Muda Gugatan	
Subhan, S.H.	Panitera Muda Permohonan	

Tabel 13 : Komposisi SDM Teknis Yudisial

Nama	Jabatan	Keterangan
Mustamin, BA.	Panitera Pengganti	
Maryam, BA.	Panitera Pengganti	
Mahfud, S.H.	Panitera Pengganti	
Abdurahman, S.H.	Panitera Pengganti	
Dra. Siti Nuraini	Panitera Pengganti	
Rahmah, S.H.I.	Panitera Pengganti	
Aminah, S.H.	Panitera Pengganti	
Saiful Akbar, S.H.	Panitera Pengganti	
Nurfauziach, S.HI.	Panitera Pengganti	
Siti Saleha, S.Ag.	Panitera Pengganti	
Fitriatunnisa, S.P., S.H.	Panitera Pengganti	
Zulkarnain, S.H.	Panitera Pengganti	
Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti	
Arief Satry, S.H.	Panitera Pengganti	
H. Sulayman, S.H.	Jurusita	
Erniati, S.H.	Jurusita	
Usri	Jurusita	
Feriman, A.Md.	Jurusita	
Hermansyah	Jurusita	
Zaidun, S.H.	Jurusita Pengganti	
M. Aris Budimansyah, S.H.	Jurusita Pengganti	
Feni Fardiansih, S.Sy.	Jurusita Pengganti	
Anny Laila Safithri, S.E., M.Si.	Jurusita Pengganti	

SDM Non Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non-Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Bima melibatkan berbagai peran yang tidak secara langsung terlibat dalam aspek teknis peradilan, tetapi tetap krusial dalam mendukung operasional dan pelayanan pengadilan. Berikut adalah beberapa komponen sumber daya manusia non-teknis yudisial di Pengadilan Agama Bima:

Tabel 14: Komposisi SDM Non Teknis Yudisial

Nama	Jabatan
Husninas, S.Ag.	Sekretaris
Ade Buhari Muslim, S.Sy.	Kepala Sub Bagian PTIP
M.Asykar, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Najir, S.Ag.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Halimah, S.HI.	Klerek - Analis Perkara Peradilan
Mursil, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan
Irma Mardian, S.P., M.Si.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan
Nurul Mahrunnisa, S.S.T.	Operator - Penata Layanan Operasional
Triyono, A.Md.	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara
Annisa Fitra Puspita, A.md	Klerek - Pengolah Data dan Informasi
Yoga Ryhan, A.Md	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara
Nabillah Puspita Cahayarini, A.Md.M.I.D.	Arsiparis Pelaksana
Rezky Puspitarani, S.E.	Operator - Penata Layanan Operasional
Irma Asyatun, S.E.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan

Selain itu terdapat Sumber Daya Manusia PPNPN (Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri) di Pengadilan Agama Bima terdiri dari 11 orang yang membantu dalam tugas dan fungsi sebagai Satuan Pengamanan, Supir dan Pramubakti.

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

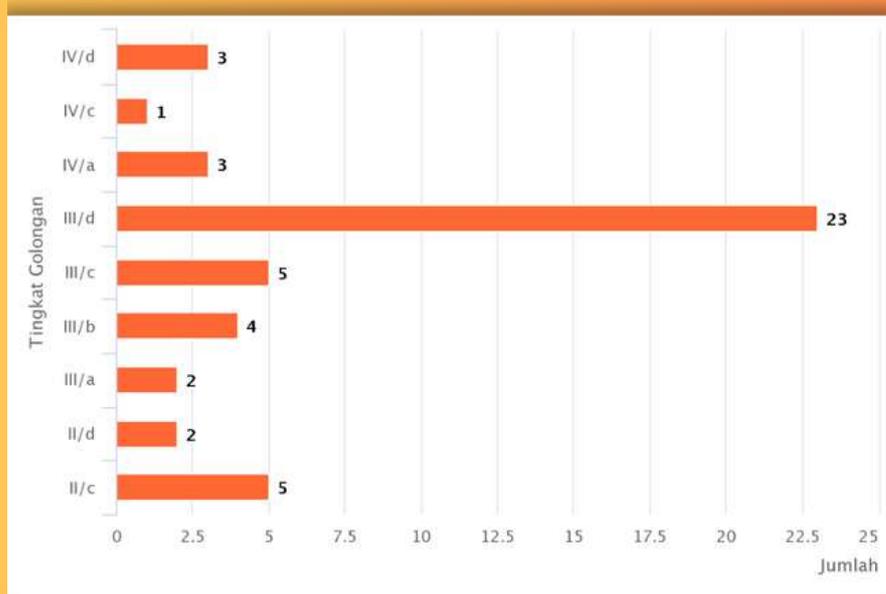
Gambar 7: Komposisi SDM berdasar jabatan



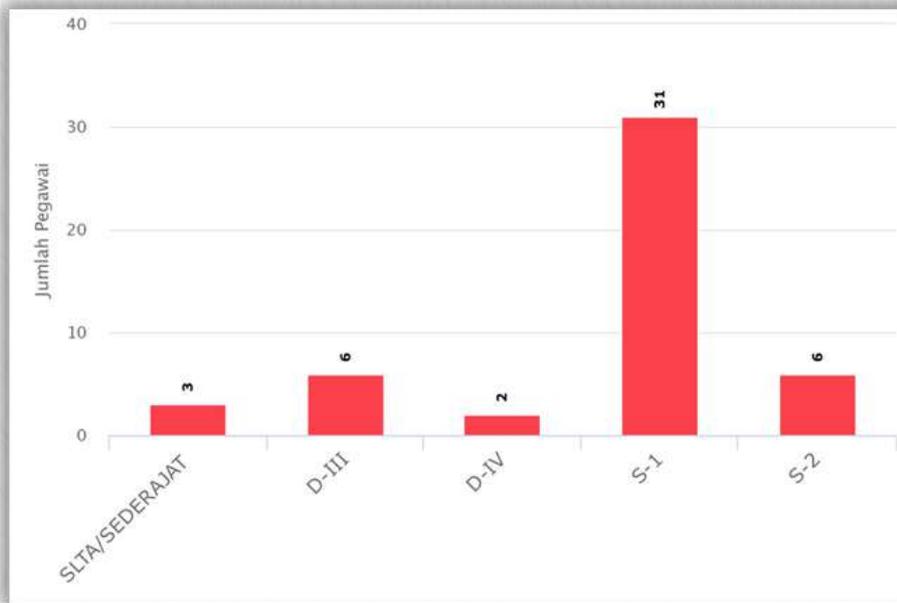
Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bima mengalami dominasi tenaga teknis yudisial, khususnya dengan jumlah panitera pengganti yang mencapai 14 orang. Meskipun demikian, struktur pegawai di pengadilan tetap terisi dengan baik dari unsur pimpinan hingga posisi staf di bidang kesekretariatan

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pangkat/Golongan

Sumber Daya Manusia berdasarkan pangkat dan golongan di PA Bima menunjukkan bahwa Pangkat/golongan Penata Tingkat I / III d adalah terbanyak. Adapun pangkat golongan tertinggi adalah IV d dengan jumlah 3 orang. Sedangkan golongan terendah adalah golongan II c dengan jumlah 5 orang pegawai.



Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan



Pada tahun 2023, komposisi pegawai di Pengadilan Agama Bima mencerminkan tingkat pendidikan yang beragam, menunjukkan upaya dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi. Jenjang Strata 1 sebanyak 31 orang dan Strata 2 sebanyak 6 orang. Masih ada 11 orang jejang Diploma dan SMA.

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kompetensi

Aparatur Pengadilan Agama Bima secara kompetensi memiliki pegawai bersertifikat ahli pengadaan barang dan jasa sebanyak 6 orang, Hakim berkompetensi dalam bidang ekonomi syariah 2 orang dan Hakim memiliki kompetensi dalam bidang mediasi sebanyak 2 orang

Tabel 15: Komposisi SDM berdasar kompetensi

Nama	Kompetensi
Drs. Muh. Mukrim, M.H.	Hakim Ekonomi Syariah
Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.	Hakim Ekonomi Syariah
H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.	Hakim Mediator Bersertifikat
Solatiah, S.HI	Hakim Mediator Bersertifikat
Husninas, S.Ag.	Ahli Pengadaan Barang dan Jasa
Ade Buhari Muslim, S.Sy.	Ahli Pengadaan Barang dan Jasa
Najir, S.Ag.	Ahli Pengadaan Barang dan Jasa
Irma Mardian, S.P., M.Si.	Ahli Pengadaan Barang dan Jasa
Anny Laila SAfithri, S.E., M.Si.	Ahli Pengadaan Barang dan Jasa
Rezky Puspitarani, S.E.	Ahli Pengadaan Barang dan Jasa

A. MUTASI

Mutasi pegawai merupakan strategi manajemen sumber daya manusia untuk memberikan pengembangan karier, penghargaan atas kinerja, dan penyesuaian kebutuhan organisasi. Dengan adanya mutasi, diharapkan pegawai dapat memberikan kontribusi yang maksimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab baru mereka.

Pada tahun 2023, terdapat sejumlah 41 orang pegawai yang mengalami mutasi, termasuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan mutasi tempat tugas.

Berikut adalah rincian mutasi pegawai selama tahun tersebut:

1. **Mutasi Kenaikan Pangkat:**
 - o Jumlah Pegawai: 5 orang
2. **Mutasi Kenaikan Gaji Berkala:**
 - o Jumlah Pegawai: 23 orang
3. **Mutasi Tempat Tugas (Keluar/Masuk):**
 - o Jumlah Pegawai: 13 orang

B. PROMOSI

Pada tahun 2023, sebanyak 12 orang pegawai di Pengadilan Agama Bima mendapatkan promosi ke jabatan baru. Promosi pegawai merupakan bentuk pengakuan terhadap kualitas kerja, dedikasi, dan kontribusi yang signifikan yang telah diberikan oleh pegawai.

Tabel 16: Komposisi promosi pegawai

Nama	Jabatan Sebelum	Jabatan Promosi
Drs. Muh. Mukrim, M.H.	Ketua PA Ambon Kelas I A	Ketua PA Bima Kelas I A
Ihyaddin, S.Ag., M.H.	Ketua PA Dompu Kelas I B	Wakil Ketua PA Bima Kelas I A
Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua PA Bima Kelas I A	Wakil Ketua PA Mataram Kls I A
Dani Haswar, S.H.I, M.H	Hakim PA Bima Kelas IA	Wakil Ketua PA Kefamenanu Kelas II
Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.	Hakim PA Mataram Kls I A	Hakim PA Bima Kls I A
Sri Atika, S.E., S.H.	Panitera Pengganti PTA Mataram	Panitera Muda Gugatan PA Bima Kls I A
Ma'ruf, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Hukum PA Bima Kls I A	Panitera Muda Hukum PA Mataram Kls I A
Nurfauziach, S.H.I	Panitera Pengganti PA Dompu Kls I B	Panitera Pengganti PA Bima Kls I A
Usri	Juru Sita PA Dompu Kelas I B	Juru Sita PA Bima Kelas I A
Sri Wahyuningsih, S.H.I	Panitera Pengganti PA Bima Kls I A	Panitera Pengganti PA Mataram Kls I A
Dra. Nurhayati	Panitera Pengganti PA Bima Kls I A	Panitera Pengganti PA Mataram Kls I A
Fitri, S.H.	Juru Sita PA Bima Kelas I A	Panitera Pengganti PA Dompu Kls I B

C. PENSIUN

Pada tahun 2023, terdapat 3 orang pegawai Pengadilan Agama Bima yang memasuki masa purna bakti atau pensiun. Kondisi pensiun ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun dan menuntaskan masa pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Berikut adalah rincian purna bakti pegawai yang terjadi pada tahun tersebut:



Drs. Nasrulloh, S.H. (alm)

Jabatan Terakhir : Ketua PA Bima
Pensiun : Meninggal dunia - 1 Mei 2023



Sirajuddin, S.H.

Jabatan Terakhir : Jurusita PA Bima
Pensiun : Mencapai usia pensiun - 1 Januari 2023

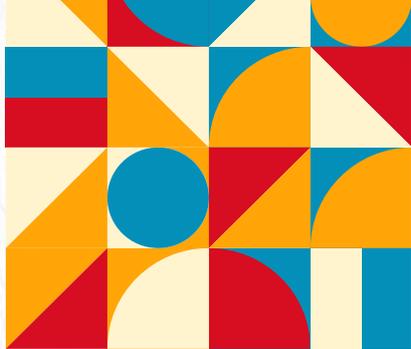


Dra. ST. Nurkhairiah

Jabatan Terakhir : Panitera Pengganti PA Bima
Pensiun : Mencapai usia pensiun - 1 Juni 2023

D. PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT)

No.	Nama/Waktu Diklat	Peserta
Diklat Teknis		
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi, Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama	(1) Subhan, S.H, (2) Abdurahman, S.H, (3)Mahfud, S.H. (4) Dra. Siti Nuraini, (5)Maryam, BA, (6) Feriman, A.Md (7) M. Yusuf
Diklat Non Teknis		
1.	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Anny Laila Safithri Irma Mardian Rezky Puspitarani
2.	Diklat Bendahara Pengeluaran	Irma Asyatun Annisa Fitra Puspita



BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA, PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) di Pengadilan Agama Bima dilaksanakan secara umum dengan membagi belanja menjadi empat bagian utama. Berikut adalah rincian dari pengelolaan keuangan tersebut:

Belanja Pegawai 5,877,664,000



Komponen biaya yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pegawai di Pengadilan Agama Bima.

Melibatkan pembayaran gaji, tunjangan, serta segala bentuk hak dan kewajiban keuangan terkait dengan sumber daya manusia di pengadilan.

Belanja Barang 1,240,929,000



Termasuk dalam belanja operasional dan administratif untuk kebutuhan sehari-hari pengadilan.

Melibatkan pengadaan barang-barang keperluan kantor, alat tulis kantor, peralatan komputer, dan sebagainya.

Belanja Modal 176,800,000



Komponen biaya yang terkait dengan pembelian aset tetap atau investasi dalam jangka panjang.

Melibatkan pembelian peralatan kantor, perangkat keras, dan investasi lainnya yang bersifat kapital.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama



241,000,000

- Biaya Prodeo: Untuk mendukung layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial.
- Sidang Keliling: Untuk mendukung pelaksanaan sidang di lokasi yang lebih terjangkau oleh masyarakat.
- Pos Bantuan Hukum: Untuk memberikan bantuan hukum gratis melalui layanan Pos Bantuan Hukum.

Tabel 17: Realisasi keuangan

Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran
Belanja Pegawai 5,877,664,000	5,709,181,633	97.13 %	168,482,367
Belanja Barang 1,240,929,000	1,227,905,475	98.95 %	13,023,525
Belanja Modal 176,800,000	176,800,000	100 %	0
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 241,000,000	234,350,000	97.24 %	6,650,000

B. PENGELOLAAN SARANA PRASARANA

Pengadilan Agama Bima memiliki Sarana dan prasarana yang memadai meskipun demikian masih banyak keterbatasan karena area yang sempit beberapa sarana sesuai standar prototype belum terpenuhi dengan optimal. Gedung Pengadilan Agama Bima terletak di wilayah Pemerintahan Kota Bima di Jl. Gatot Subroto, No. 10, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima yang berada di atas tanah dengan status Hak Pakai dengan luas tanah 1.268 m², luas bangunan 950 m², dengan total nilai aset bangunan sebesar Rp3.582.296.000.

Tabel 18 : Sarana Prasarana kantor

No.	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	1
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Sidang	2
7	Ruang Panitera Pengganti	2
8	Ruang Pelayanan(Ruang Panmud gugatan dan PTSP)	1
9	Ruang Kepaniteraan (Ruang Panmud Hukum dan Permohonan)	1
10	Ruang Kasubbag PTIP, Umum dan Keuangan	1
11	Ruang Kasub Kepegawaian dan Ortala	1
12	Ruang JUrusita/Jurusita Pengganti	1
13	Ruang Media Center	1
14	Ruang Kasir	0
15	Ruang Bendahara	1
16	Ruang Mediasi	1
17	Ruang Meja Informasi dan Pengaduan	1
18	Ruang Arsip Perkara	1
19	Ruang Meja Informasi	1
20	Ruang Arsip	1
21	Ruang Server	1
22	Ruang Perpustakaan	1
23	Ruang Tunggu Sidang	1
24	Ruang Tamu Terbuka	1
25	Ruang Laktasi	1
26	Smoking Area	1
27	Gudang	1
28	Toilet Pria	2
29	Toilet Wanita	1
30	Pos Satpam	1

Tabel 19 : Sarana Fasilitas kantor

No.	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah
1	Lemari Kayu	17
2	Rak Besi	11
3	Rak Kayu	10
4	Filing Kabinet besi	2
5	Brandkas	1
6	Buffet	4
7	CCTV	1
8	Mesin Absensi	1
9	LCD Projector/Infocus	2
10	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
11	Mesin Antrian	1
12	Meja Kerja Kayu	71
13	Kursi Besi/Metal	148
14	Kursi Kayu	4
15	Sice	9
16	Bangku Panjang Besi/Metal	8
17	Bangku Panjang Kayu	16
18	Meja Rapat	6
19	Meja Komputer	18
20	Lemari Es	1
21	AC Split	28
22	Televisi	4
23	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya)	1
24	Loudspeaker	4
25	Wireless	1
26	Unit Power Supply	8
27	Camera Video	1
28	Tiang Bendera	2
29	Water Filter	1
30	Dispenser	3
31	Palu Sidang	2
32	Lambang Instansi	1
33	Handy cam	1
34	Asbak Tinggi	8
35	Audio Mixing Portable	1

No.	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah
36	UPS	10
37	Microphone Cable	11
38	Video Conference	1
39	PABX	2
40	Facsimile	1
41	Genset	1
42	PC Unit	54
43	Laptop	29
44	Monitor	5
45	Printer	28
46	server	3
47	Router	1

Tabel 20 : Kendaraan Dinas

No.	Kendaraan Dinas	Tahun Perolehan	Kodisi			Ket
			Baik	RR	RB	
1	Mini Bus Toyota Innova	2006	x			
2	Mini Bus Toyota Avanza	2011	x			
3	Mini Bus Toyota Avanza	2011	x			
4	Honda Supra X	2005	x			
5	Honda Supra X	2008	x			
6	Honda Supra X	2008	x			
7	Honda Supra X	2008	x			
8	Honda Supra X	2008	x			
9	Honda Supra X	2009	x			
10	Honda Supra X	2009	x			
11	Honda Supra X	2009	x			
12	Honda Supra X	2009	x			
13	Honda Mega Pro	2012	x			

Tabel 21 : Rumah Dinas

No.	Uraian	Jumlah	Kodisi			Ket
			Baik	RR	RB	
1	Rumah Dinas Ketua	1	x			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	x			
3	Rumah Dinas Hakim	0				
4	Rumah Dinas Panitera	0				
5	Rumah Dinas Sekretaris	0				

Pengadaan 2023

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bima melaksanakan pengelolaan anggaran belanja dengan fokus pada penambahan nilai gedung dan bangunan, serta pengadaan barang dari Badan Dirjen Peradilan Agama dan Badan Umum Administrasi. Berikut adalah rincian dan realisasi anggaran untuk keperluan tersebut:

1. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan:

- Anggaran: Rp. 100.000.000,-
- Realisasi Anggaran: Rp. 100.000.000,-
- Persentase Realisasi: 100%
- Keterangan: Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan nilai dan kondisi gedung dan bangunan Pengadilan Agama Bima.

2. Gedung Pos Jaga Permanen:

- Anggaran: Rp. 76.800.000,-
- Realisasi Anggaran: Rp. 76.800.000,-
- Persentase Realisasi: 100%
- Keterangan: Anggaran ini digunakan untuk membangun atau mempermanenkan pos jaga yang diperlukan untuk keamanan dan pengawasan di Pengadilan Agama Bima.

3. Pengadaan Barang dari Badan Dirjen Peradilan Agama dan Badan Umum Administrasi:

- 2 unit Laptop Axioo
- 2 unit Scanner Fujitsu
- Total Anggaran: Rp. 64.700.000,-
- Keterangan: Pengadaan barang ini merupakan inisiatif dari Badan Dirjen Peradilan Agama dan Badan Umum Administrasi untuk mendukung kelancaran operasional Pengadilan Agama Bima, termasuk peningkatan fasilitas teknologi dan perlengkapan kantor.

Pemeliharaan 2023

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bima mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 148.295.000,- untuk pemeliharaan kantor, dengan fokus pada perawatan sarana dan prasarana fasilitas kantor. Berikut adalah rincian dan realisasi anggaran untuk pemeliharaan tersebut:

1. Anggaran Pemeliharaan Kantor:

- Anggaran: Rp. 148.295.000,-
- Persentase Realisasi: 100%
- Keterangan: Anggaran ini dialokasikan untuk pemeliharaan secara umum di Kantor Pengadilan Agama Bima, mencakup berbagai aspek seperti perawatan gedung, kebersihan, dan keamanan.

2. Anggaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin:

- o Anggaran: Rp. 164.950.000,-
- o Realisasi Anggaran: Rp. 164.830.475,-
- o Persentase Realisasi: 99.93%
- o Keterangan: Anggaran ini digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin kantor, termasuk perawatan kendaraan, perawatan komputer (PC dan laptop), perawatan printer, perawatan AC, dan pemeliharaan inventaris kantor lainnya.

Penghapusan 2023

Tahun Anggaran 2023, tidak dilakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada fasilitas sarana dan prasarana Gedung dan Bangunan di Pengadilan Agama Bima. Penghapusan BMN biasanya dilakukan jika barang tersebut sudah tidak layak atau tidak digunakan lagi, dan proses ini diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tidak adanya penghapusan BMN, dapat diartikan bahwa fasilitas sarana dan prasarana Gedung dan Bangunan di Pengadilan Agama Bima masih dalam kondisi baik dan dapat terus dimanfaatkan. Pemeliharaan dan penggunaan optimal atas barang-barang milik negara menjadi penting untuk mendukung kelancaran operasional dan pelayanan di lembaga peradilan tersebut.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Implementasi e-Court (Persidangan Online)

e-Court adalah instrumen Pengadilan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien dan terjangkau kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 7 Tahun 2022, aplikasi e-Court mencakup beberapa fitur kunci dalam penanganan perkara secara online.



Aplikasi e-Court diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan layanan peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penerapan e-Court memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan sistem peradilan tanpa harus hadir secara fisik, memberikan kemudahan dan inovasi dalam penanganan perkara.



**632 PERKARA
SEPANJANG 2023**

Tahun 2023 merupakan tahun keempat Pengadilan Agama Bima menyelenggarakan pelayanan pendaftaran perkara melalui aplikasi e-Court. Pada tahun tersebut, tercatat sejumlah 632 perkara yang menggunakan aplikasi e-Court. Rinciannya adalah 443 perkara yang diajukan oleh pengguna terdaftar dan 189 perkara oleh pengguna lain

Perlu diperhatikan bahwa terdapat penurunan jumlah pengguna e-Court dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 yang mencatat 690 perkara yang menggunakan aplikasi ini. Meskipun mengalami penurunan, penggunaan e-Court tetap menjadi opsi yang signifikan bagi masyarakat dalam melakukan pendaftaran perkara, memberikan alternatif yang lebih efisien dan modern dalam mengakses layanan peradilan.

Penerapan SIPP

Pada akhir tahun 2023, Pengadilan Agama Bima berhasil melakukan update terbaru pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), mencapai versi 5.3.1. Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pelaksanaan administrasi perkara, mulai dari pendaftaran hingga minutas. Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Bima mencapai tingkat signifikan, yakni sebesar 98,14% pada akhir tahun tersebut.

Selain itu, untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi, Pengadilan Agama Bima dilengkapi dengan sejumlah perangkat keras (hardware) yang mendukung operasional SIPP.

Tabel 22 : Perangkat keras operasional SIPP

No.	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	Local Area Network (LAN)	1	
2	Pc unit	54	
3	Laptop	27	
4	Scanner	2	
5	UPS	18	
6	Server	3	
7	Router	1	
8	Hub	1	
9	Modem	2	
10	Wireless Access Point	5	

Perangkat lunak yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bima mencakup aplikasi-aplikasi baik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, maupun yang dikembangkan oleh pihak ketiga. Beberapa aplikasi tersebut antara lain:

Tabel 23 : Perangkat lunak operasional kantor

No.	Jenis Aplikasi	Status
1	Aplikasi SIPP	Aktif
2	Aplikasi Siman	Aktif
3	Aplikasi Simpeg	Aktif
4	Aplikasi SIKEP MA-RI	Aktif
5	Aplikasi SAKTI Kemenkeu	Aktif
6	Aplikasi Gaji Web	Aktif
7	Aplikasi e-Court	Aktif
8	Aplikasi SIAP Surat	Aktif
9	Aplikasi Antrian PTSP	Aktif
10	Aplikasi e-Tamu	Aktif
11	Aplikasi Antrian sidang	Aktif
12	Aplikasi komdanas	Aktif
13	Aplikasi SMS notif	Aktif
14	Aplikasi ABS-SIPP	Aktif
15	Aplikasi SIWAS	Aktif
16	Aplikasi SIMARI	Aktif
17	Aplikasi OMSPAN	Aktif
18	Aplikasi SIRUP LPSE	Aktif
19	Web Monsakti	Aktif

JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Mahkamah Agung adalah wadah yang bertujuan untuk pendayagunaan bersama dokumen hukum dan kebijakan di lingkungan tersebut. Website JDIH satker Pengadilan Agama Bima, www.jdih.pa-bima.go.id, telah diluncurkan pada bulan Oktober 2022 dan sudah dapat diakses oleh publik.

Gambar 8 : JDIH Pengadilan Agama Bima



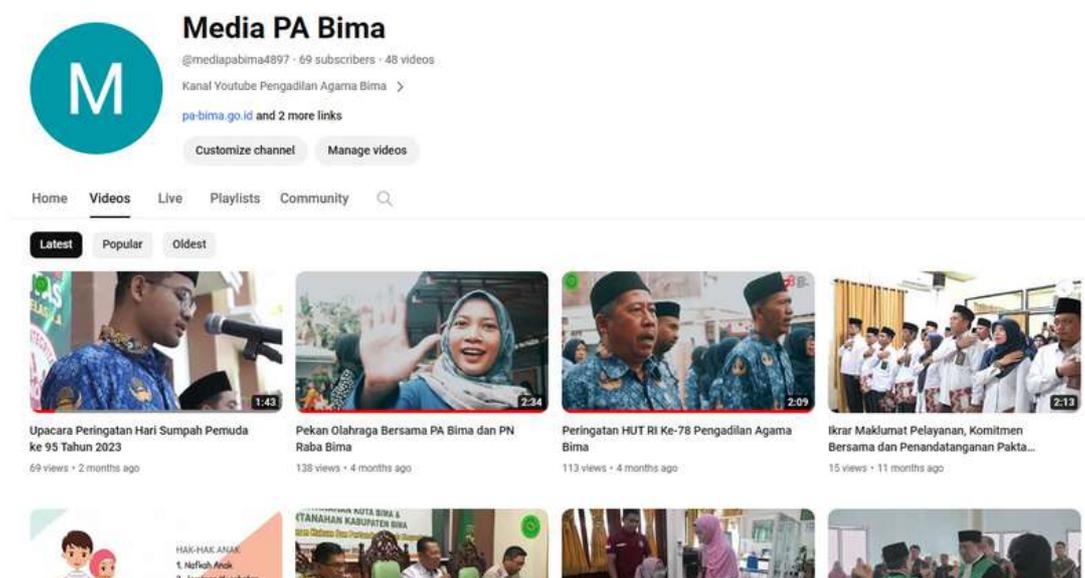
Hingga bulan Desember 2023, tercatat bahwa:

- Telah diupload 32 dokumen produk hukum Pengadilan Agama Bima ke dalam sistem JDIH.
- Website tersebut telah diakses oleh 1.573 pengunjung, menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mengakses informasi hukum yang disediakan.
- Terdapat 1.263 kali download dokumen produk hukum, menunjukkan bahwa dokumen-dokumen tersebut memiliki nilai signifikan dan relevansi bagi pengguna.

Dengan adanya JDIH dan website Pengadilan Agama Bima, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan pelayanan peradilan. Ini menciptakan transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas dalam informasi hukum di lingkungan peradilan.

Media Sosial

Akses internet yang semakin meningkat di kalangan masyarakat telah memicu peningkatan pemanfaatan media sosial sebagai sumber informasi utama. Media sosial cenderung menyebar lebih cepat. Dalam konteks Pengadilan Agama Bima, kekuatan media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana alternatif penyebaran informasi hukum, kebijakan, dan layanan peradilan. Dengan memanfaatkan media sosial, Pengadilan Agama Bima dapat lebih mudah dan cepat menjangkau masyarakat, memberikan informasi terkini, serta meningkatkan tingkat kesadaran hukum di kalangan publik. Selain itu, keberadaan media sosial juga dapat memberikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, menciptakan keterlibatan yang lebih aktif dalam hal-hal terkait dengan peradilan.



e Brosur

Pengadilan Agama Bima telah mengambil inisiatif untuk menyediakan media informasi tambahan dalam bentuk E-Brosur. E-Brosur ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna layanan, melibatkan bentuk brosur digital dan video. Berikut adalah cakupan E-Brosur Pengadilan Agama Bima selama tahun 2023:

1. Brosur Digital:

- o Brosur digital mencakup informasi, layanan, dan prosedur berperkara. Brosur ini diunggah di website Pengadilan Agama Bima, memungkinkan akses mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

2. Video:

- o Bagian IT Pengadilan Agama Bima telah menghasilkan 4 video terkait kegiatan, informasi, dan layanan inovasi baru, seperti Layanan Mediasi dan Pencatatan Nikah Online (LAMPABIMA). Video-video tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih visual dan interaktif kepada masyarakat.

Dengan adanya E-Brosur, Pengadilan Agama Bima menjawab kebutuhan akan informasi yang lebih modern dan mudah diakses oleh masyarakat. Media ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga dapat memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan terlibat melalui konten visual seperti video.



BAB V. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam rangka peningkatan layanan kepada Para Pencari Keadilan oleh Pengadilan Agama Bima telah melakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan Akreditasi Penjaminan Mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan Administrasi Manajemen, Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Berdasarkan hasil penilaian terakhir Asesor Eksternal yang telah diverifikasi, Komite Akreditasi Penjaminan Mutu menetapkan serta mengumumkan bahwa Pengadilan Agama Bima memperoleh Akreditasi A Axcellence (Sangat Baik). Dalam kurun waktu 2023 Pengadilan Agama Bima giat melakukan upaya-upaya untuk meraih predikat WBK. Oleh karenanya pembinaan dan pembimbingan dari internal seperti Pengadilan Tinggi Agama Mataram diikuti oleh tim Zona Integritas. Bahkan kerja sama dan MoU dengan Satker KPPN Bima telah ditandatangani pada Bulan Desember 2023 dalam rangka pembimbingan untuk mencapai WBK.

Gambar 9: MoU pendampingan WBK bersama KPPN Bima



B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Layanan PTSP di Pengadilan Agama Bima mencakup:

- Meja Permohonan Informasi dan pengaduan yakni meja yang melayani permohonan informasi dan pengaduan dimana petugasnya memiliki kompetensi di bidang informasi peradilan sehingga mampu memberikan informasi yang jelas kepada para pencari keadilan
- Meja Pelayanan Pendaftaran Perkara yakni tempat pendaftaran perkara permohonan/gugatan, upaya hukum, serta permohonan eksekusi
- Meja Kasir: memberikan layanan penaksiran panjar biaya perkara, pemberiam SKUM, pembayaran PNPB, pengembalian sisa panjar dan penyerahan bukti- bukti pembayaran
- Meja Produk Pengadilan yakni meja yang melayani pengambilan produk pengadilan oleh petugas produk pengadilan
- Pojok E-Court melayani masyarakat yang ingin mengajukan perkaranya melalui aplikasi e-Court
- Meja Gugatan Mandiri melayani masyarakat yang ingin membuat gugatan secara mandiri
- Loker Prioritas melayani kelompok rentan dengan fasilitas kursi roda, buku braile dan alat bantu disabilitas



Loker Prioritas



Loker PTSP

PTSP Pengadilan Agama Bima telah menyediakan loket prioritas untuk melayani kelompok rentan dan disabilitas dimana kelompok tersebut akan dilayani secara prioritas dimulai saat kedatangan kemudian diberikan kartu/ID khusus untuk diantarkan ke loket khusus. Di loket khusus disediakan buku braille, kursi roda, maupun alat bantu disabilitas serta petugas yang akan membantu para pencari keadilan agar lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan keadilan.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Tahun 2023 Dirjen Badilag mengadakan kompetisi inovasi layanan publik. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pengadilan Agama Bima berangkat dari kendala/masalah yang dihadapi para pencari keadilan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima mengusung inovasi LAMPA BIMA. LAMPA BIMA adalah Layanan Masyarakat Pengadilan Agama Bima

Masalah yang dihadapi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima adalah efisiensi dan aksesibilitas dalam pelayanan hukum. Pertama, luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima yakni terdiri dari 2 wilayah pemerintahan daerah yaitu Kabupaten Bima dengan 18 kecamatan dan Kota Bima dengan 5 kecamatan, mengakibatkan para pihak yang ingin mendapatkan kepastian hukum harus mengeluarkan biaya lebih tinggi dalam mengurus perkara mereka. LAMPA BIMA merupakan program unggulan Pengadilan Agama Bima yang tujuannya mengimplementasikan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lampa diadopsi dari Bahasa Daerah Bima yang arti Berjalan atau Jalan. LAMPA BIMA adalah layanan mobile Pengadilan Agama Bima yang menggabungkan Layanan PTSP dan sidang di luar Gedung dengan memanfaatkan teknologi dalam pelayanan hukum untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Mengimplementasikan sistem pendaftaran online, persidangan elektronik, dan platform digital untuk memudahkan para pihak dalam mengurus perkara mereka.





BAB VI. PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan di Pengadilan Agama Bima diarahkan pada pemastian bahwa semua tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Ini adalah fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan pelaksanaan tugas agar berjalan dengan baik. Pengawasan ini dilakukan dengan dua jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Rutin/Reguler.

Pengawasan Melekat melibatkan pembentukan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dengan tugas-tugas spesifik sesuai bidang masing-masing. **Koordinator Hakim Pengawas Bidang, Ihyaddin, S.Ag., MH**, memastikan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan pengawasan. Adapun Hakim Pengawas Bidang melibatkan **Abubakar, SH** (Manajemen Peradilan), **Uswatun Hasanah, S.Hi** (Administrasi Perkara), **Solathiah, S.Hi** (Kesekretariatan), dan **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH., MH** (Manajemen Kinerja Pelayanan Publik).



Hasil temuan pengawas Bidang selama empat triwulan menunjukkan bahwa secara umum, kinerja Pengadilan Agama Bima dalam keempat aspek pengawasan telah berjalan dengan baik. Meskipun begitu, temuan-temuan tersebut muncul karena kurangnya koordinasi dan pemahaman pelaksana terhadap sistem kerja. Oleh karena itu, untuk masa yang akan datang, diperlukan perbaikan guna memastikan kelancaran dan keefektifan sistem kerja Pengadilan Agama Bima.



Pengawasan dan Pembinaan
oleh Hakim Pengawas Bidang



Pengawasan dan Pembinaan
oleh Hakim Pengawas Bidang

B. EVALUASI

Pengadilan Agama Bima selalu berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan evaluasi secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Evaluasi dilakukan pada dua bidang utama, yaitu Bidang Kepaniteraan (Administrasi Peradilan) dan Bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum). Berikut adalah rangkuman evaluasi untuk kedua bidang tersebut:

1. Bidang Kepaniteraan (Administrasi Peradilan):

- Dilakukan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui rapat-rapat periodik dengan hakim, panitera pengganti, jurusita/juru sita pengganti, dan petugas kepaniteraan.
- Rapat koordinasi diadakan secara rutin dengan seluruh karyawan/karyawati setidaknya satu kali dalam sebulan.
- Pengawasan dan pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
- Pengawasan rutin dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan setiap tahun.

2. Bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum):

- Langkah-langkah evaluasi termasuk rapat-rapat dengan kasubbag, petugas pengelola keuangan, rapat dengan petugas kebersihan, dan satpam sesuai dengan kebutuhan.
- Rapat koordinasi rutin dengan karyawan/karyawati Pengadilan Agama Bima minimal satu bulan sekali.
- Pengawasan dan pembinaan dari hakim pengawas bidang dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
- Pengawasan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI setiap tahun.
- Evaluasi program kerja dilakukan pada setiap tahun.

Melalui langkah-langkah evaluasi ini, Pengadilan Agama Bima bertujuan untuk terus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat pencari keadilan.



Pengawasan dan Pembinaan
oleh PTA Mataram



Pengawasan dan Pembinaan
oleh Bawas MA RI



BAB VII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Penyelesaian perkara tahun 2023 pada tingkat pertama telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, sisa perkara dari tahun 2022 sebanyak 9 perkara, ditambah yang diterima pada tahun 2023 sebanyak 2.470 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2023 sebanyak 2.479 perkara dan telah berhasil diselesaikan sebanyak 2.433 perkara (98,1%), sisanya sebanyak 46 perkara (1,9%).
- Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara, telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang perlu diperbaiki/disempurnakan.
- SIPP sebagai aplikasi yang menggunakan Teknologi Informasi yang digunakan untuk administrasi penanganan perkara, penyediaan informasi publik, pencatatan kinerja dan pelaporan telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Bima dengan menggunakan versi 5.3.1 (update terbaru). Diakhir tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mencapai angka 98,1 %.
- Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.
- Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai SIMPEG, SIKEP SIMARI,, bagian keuangan memakai sistem aplikasi Keuangan telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan.
- Jumlah pegawai menurut jenis pekerjaan dan fungsinya belum seimbang dengan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan.
- Secara kumulatif, nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Bima tahun 2023 berhasil dengan baik.
- Pengelolaan Mutasi dan Gaji Berkala berdasarkan tanggal SK dan periode telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- Komposisi tenaga teknis yudisial dengan non teknis yudisial belum sesuai karena banyak tenaga non yudisial yang diangkat menjadi tenaga yudisial.

B. REKOMENDASI

- SDM non teknis diharapkan ada penambahan pegawai non sarjana hukum untuk ditempatkan di bidang administrasi umum / kesekretariatan terutama SDM yang mempunyai kualifikasi di bidang Teknologi Informasi (pranata komputer).
- Diharapkan adanya peningkatan anggaran rutin dan belanja modal khususnya Peralatan Kerja (Laptop, PC. Unit, Scanner, Printer, Penambahan Jumlah CCTV, dan perangkat Teknologi Informasi untuk mendukung penyelesaian tugas sesuai bidangnya masing-masing. dan belanja modal perluasan gedung untuk ruang arsip, ruang kerja dan perpustakaan beserta barang inventaris lainnya agar barang-barang yang usang/sudah tidak layak, bisa diganti yang lebih layak
- Pembinaan dan pelatihan kepada hakim dan seluruh pegawai perlu terus-menerus ditingkatkan guna mewujudkan aparat hakim dan pegawai yang profesional (berwawasan luas, terampil menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq mulia).
- Selanjutnya kepada seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural di lingkungan Pengadilan Agama Bima, disarankan lebih meningkatkan disiplin, integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan moralitas.